

Nono Sampono, Ketua Kaukus DPD RI Kawasan Timur Indonesia

Bangun Kantor Pemerintahan Pusat di Timur, Percepat Pertumbuhan dan Pemerataan

Pembangunan infrastruktur di kawasan timur harus menjadi prioritas pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan, pemerataan dan mewujudkan keadilan. Saat ini, sebagian besar pembangunan terpusat di wilayah barat, sedangkan di wilayah timur masih jauh tertinggal hampir di semua sektor.

"Jelas sekali telah terjadi disparitas atau kesenjangan pembangunan nasional, khususnya infrastruktur yang harus menjadi prioritas pemerintah pusat, agar kue pembangunan bisa dinikmati, dirasakan dan keadilan bisa diwujudkan di kawasan timur, " ujar doktor di bidang kelautan dan perikanan dari Institut Pertanian Bogor di Jakarta, baru-baru ini.

Selain untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Senator asal Maluku itu mengusulkan agar dibangun kantor pemerintahan pusat di kawasan timur, bisa bersifat permanen atau temporer.

"Untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan khususnya infrastruktur dan SDM. Selain ada kantor pemerintahan pusat di Jakarta, juga perlu dibangun di kawasan timur baik bersifat permanen atau temporer yang bisa dibubarkan jika pemerataan pembangunan telah tercapai," usulnya.

Teknis pelaksanaannya, yaitu Presiden dan Wakil Presiden bergantian selain berkantor di pusat pemerintahan di Jakarta, juga di kantor pemerintahan pusat di wilayah timur yang diikuti anggota kabinet dan pejabat setingkat menteri bisa menyesuaikan.

Dengan dibangunnya kantor pemerintahan pusat di kawasan timur, bisa mengefektifkan sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan, serta memperpendek jarak dan waktu bagi para kepala daerah dan pejabat untuk untuk berkordinasi, termasuk menggerakkan roda pere konomian daerah. Dari sisi pertumbuhan ekonomi daerah, tentu akan menarik para investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk berbagai pembangunan, seperti di bidang pariwisata dan budaya akan dibangun bandara dan hotel baru. Sedangkan untuk bidang pendidikan dan riset bisa dibangun perguruan tinggi sebagai pusat studi dan pengkajian di bidang kelautan dan kamaritiman.

Termasuk transportasi laut (tol laut) akan terkoneksi dimana arus barang dan manusia semakin lancar, terjadi pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan bisa segera terealisasi. Sekaligus mendukung program unggulan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Langkah baru tersebut, mengubah dari paradigma ekonomi darat ke laut karena kejayaan di laut sudah dicontohkan oleh pendahulu nenek moyang bangsa. Kekayaan potensi laut Indonesia bisa menambah pendapatan negara hingga enam kali lipat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang tembus dikisaran Rp 2.019,9 triliun.

"Kebijakan di masa lalu yang terlalu berorientasi ke darat (continental oriented) mesti dikoreksi ke arah Kelautan (maritime oriented). Sebab kondisi objektif Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, " tandas Mantan Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) itu.

Karena paradigma pembangunan nasional terlalu berbasis kontinental berakibat daerah-daerah kepulauan tidak berkembang karena minimnya anggaran yang disediakan untuk daerah tersebut. Terutama, hampir seluruh provinsi dan kabupaten yang tergolong tertinggal berada di wilayah timur. Misalnya, anggaran Provinsi Maluku sama dengan Kabupaten Malang karena semata anggaran dihitung dari jumlah penduduk dan wilayah darat. Sehingga tidak dapat dihindari terjadinya ketertinggalan dan kemiskinan, oleh karenanya harus mendapatkan perhatian secara khusus.

"Jika anggaran ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah darat, kapan daerah-daerah kepulauan bisa dibangun? Nah, dengan kehadiran kantor pemerintahan pusat di timur, maka masyarakat di kawasan tersebut akan mengapresiasi dan menyambut sangat luar biasa karena merasa diperhatikan, " katanya.

Sementara itu, untuk pembangunan SDM dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan berbagai perguruan tinggi unggulan, kerena selama ini tertlalu fokus di pulau jawa. Peran perguruan tinggi sangat strategis sebagai agen perubahan untuk mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bila perlu berikan insentif yang lebih kepada para dosen yang bertugas di PT kawasan timur.

Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, pembangunan perguruan tinggi unggulan dengan berbagai program khusus yang didukung dosen

berkualitas dan kesejahteraan tinggi bisa menjadi upaya nyata mendorong penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kemaritiman.

“Tidak ada satu pun negara yang hebat di dunia yang hebat tanpa memiliki kampus yang hebat. Dalam waktu 5 hingga 10 tahun berbagai kampus unggulan bisa hadir merata di kawasan timur dan seluruh Indonesia, Sehingga para mahasiswa tidak perlu meneruskan kuliah di pulau Jawa.” tandasnya.